

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PAJAK DAERAH  
(STUDI DI KABUPATEN TEMANGGUNG)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**DEVIANI PERMATASARI SAPUTRO  
12020113140115**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2018**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Deviani Permatasari Saputro  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020113140115  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi  
Studi Pembangunan  
Judul Skripsi : **FAKTOR - FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PAJAK DAERAH  
(STUDI DI KABUPATEN  
TEMANGGUNG)**  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Miyasto, SU.

Semarang, 27 Januari 2018  
Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. H. Miyasto, SU.)  
NIP. 1995012251975011001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Deviani Permatasari Saputro

Nomor Induk Mahasiswa : 12020113140115

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi  
Pembangunan

Judul Skripsi : **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PAJAK DAERAH (STUDI DI KABUPATEN  
TEMANGGUNG)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 09 Februari 2018**

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Miyasto, SU. (.....)
2. Firmansyah, SE., MSi., Ph. D. (.....)
3. Evi Yulia Purwanti, SE., MSi (.....)

Mengetahui  
Pembantu Dekan I,

(Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.)  
NIP. 19670809 199203 1001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Deviani Permatasari Saputro, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah (Studi di Kabupaten Temanggung), adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas yang saya terima.

Semarang, 27 Januari 2018

Yang membuat pernyataan

Deviani Permatasari Saputro

NIM. 12020113140115

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

Dan, Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah itu sangat besar.

(Q.S. An-Nisa: 113)

Sesungguhnya ilmu itu didapat hanya dengan belajar, dan kesabaran itu diperoleh hanya dengan latihan.

(La Tahzan)

*Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow what you truly want to become.*

(Steve Jobs)

Skripsi ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta dan orang terkasih yang selalu ada memberi semangat.

## ABSTRACT

Tax is one of the sources of local revenue. In terms of Regency Own Source Revenue (PAD), Temanggung Regency has below-average income tax. According to the potential of existing tax, Temanggung Regency has good potential yet has not been reviewed effectively and efficiently. The amount of income tax can be affected by several variables, which are Gross Domestic Regional Product (PDRB), inflation, population density, and the amount of tourists.

The objective of this research is to analyze the income tax revenue in Temanggung Regency in accordance with factors affecting local tax revenues in 2008-2016 namely Gross Domestic Regional Product (PDRB), inflation, the amount of tourists, and population density. The data used in this research are secondary data. The analysis model used is multiple linear regression analysis. Multiple linear regression analysis using classical assumption test include normality test, multicollinearity test, auto correlation test, heteroscedasticity test, and hypothesis test through F regression testing, T regression testing and coefficient of determination ( $R^2$ ).

The analysis result of this research indicates that Gross Domestic Regional Product (PDRB) and the amount of tourists affect positively and significantly, meanwhile inflation and population density affect negatively and insignificantly. From the analysis of F regression testing result, it is found that the variables of Gross Domestic Regional Product (PDRB), inflation, population density, and the amount of tourists affect significantly towards regional income tax. The independent variable of adjusted  $R^2$  value which is 96,52% can affect government revenue, meanwhile 3,48% of the rest of variables beside the applied variables inside the research affects regional income tax.

Keywords: Regional Income Tax, Temanggung Regency, PDRB, Population Density.

## ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan daerah. Kabupaten Temanggung dalam hal PAD memiliki penerimaan pajak yang masih di bawah rata-rata. Dilihat dari potensi pajak yang ada, Kabupaten Temanggung memiliki potensi yang cukup baik namun belum digali secara efektif dan efisien. Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu PDRB, inflasi, kepadatan penduduk, dan jumlah pengunjung obyek wisata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak daerah di Kabupaten Temanggung sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah tahun 2008-2016 yaitu PDRB, inflasi, jumlah pengunjung obyek wisata, dan kepadatan penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda menggunakan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokolerasi, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis melalui uji F, uji t dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB dan jumlah pengunjung obyek wisata berpengaruh positif signifikan sedangkan variabel inflasi dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif tidak signifikan. Analisis hasil uji F diketahui bahwa variabel PDRB, inflasi, kepadatan penduduk dan jumlah pengunjung obyek wisata berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Nilai *Adjusted R square* sebesar 96,52 persen variabel independen dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah sedangkan 3,48 persen penerimaan pajak daerah dipengaruhi variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian.

**Kata Kunci:** Penerimaan Pajak Daerah, Kabupaten Temanggung, PDRB, Kepadatan Penduduk

## KATA PENGANTAR

Puji syukur pada kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah (Studi di Kabupaten Temanggung)”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memnuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak baik moril maupun materil, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di FEB UNDIP.
2. Akhmad Syakir Kurnia, Ph. D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
3. Prof. Dr. H. Miyasto, SU. selaku dosen pembimbing, yang telah banyak sekali memberikan bimbingan, motivasi, arahan, petunjuk, kemudahan, dan ilmu yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.



5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam memperoleh ketersediaan data selama pelaksanaan penelitian.
6. Seluruh keluarga, Papa, Mama, dan adik yang selalu memberikan motivasi, perhatian, dukungan, kesabaran, dan doa yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Wahyu Fajar Herdiyono yang selalu memberi dukungan, perhatian, kesabaran, motivasi, dan doa yang tulus kepada penulis.
8. Sahabat yang saling membantu dan memberikan dukungan, Anak Sholehah: Ima, Nisa, Icha, dan Galuh.
9. Teman-teman IESP 2013 untuk semua pengalaman yang telah diberikan.
10. Semua pihak yang sudah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang belum dapat diucapkan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritikan kepada penulis untuk skripsi ini.

Semarang, 27 Januari 2018

Deviani Permatasari Saputro

NIM. 12020113140115

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Research Gap.....	12
1.3 Rumusan Masalah .....	15
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	16
1.4.2 Kegunaan Penelitian .....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Landasan Teori .....	18
2.1.1 Pajak.....	18
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	24
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	24
2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah .....	24
2.2.3 Pajak Daerah .....	25
2.2.4 Pajak Provinsi .....	26
2.2.5 Pajak Kabupaten/Kota .....	29
2.2.6 Tolak Ukur untuk Menilai Pajak Daerah.....	31

2.2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah.....	32
2.3 Penelitian Terdahulu.....	37
2.4 Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	48
3.1.1 Variabel Dependen .....	48
3.1.2 Variabel Independen .....	48
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	49
3.2.1 Jenis dan Sumber Data.....	49
3.2.2 Metode Analisis .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....	54
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Temanggung .....	54
4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Temanggung .....	54
4.1.3 Keadaan Ekonomi.....	55
4.3 Analisis Deskriptif.....	56
4.4 Analisis Data dan Pembahasan.....	61
4.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	62
4.4.2 Pengujian Hipotesis .....	66
4.5 Interpretasi Hasil Pengolahan Data .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran .....	72
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Se Jawa Tengah Tahun 2011-2013 (Ribuan Rupiah) .....	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Temanggung .....	4
Tabel 1.3 Tax Ratio Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung.....	6
Tabel 1.4 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung (Jutaan Rupiah)	8
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk di Kabupaten Temanggung.....	9
Tabel 1.6 Tingkat Inflasi di Kabupaten Temanggung .....	10
Tabel 1.7 Tingkat Jumlah Pengunjung di Kabupaten Temanggung .....	11
Tabel 1.8 Research Gap .....	14
Tabel 2.1 Perbandingan Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.....	25
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015.....	55
Tabel 4.2 Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Temanggung 2015-2016 (Jutaan Rupiah)	55
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif .....	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser .....	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah .....	32
Gambar 4.1 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008- 2016 (Milyar Rupiah).....	57
Gambar 4.2 Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Kabupaten Temanggung.....	58
Gambar 4.3 Perkembangan Inflasi Kabupaten Temanggung .....	59
Gambar 4.4 Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Obyek Wisata .....	60
Gambar 4.5 Pertumbuhan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung .....	61
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera .....	62
Gambar 4.7 Hasil Uji Durbin Watson.....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Variabel .....	78
Lampiran B Hasil Statistik Deskriptif.....	80
Lampiran C Hasil Uji Asumsi Klasik .....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam (Triyono 2007:3). Pada umumnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Seiring dengan perkembangan mengenai peraturan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai negara. Negara Indonesia mengalami perubahan pembangunan, baik dari strategi ekonomi hingga strategi pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan model pembangunan masyarakat.

Sejak tahun 2000 Indonesia telah menggunakan sistem desentralisasi dalam sistem pemerintahannya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2004 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adanya peraturan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah

merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut dari hasil sumber daya yang dimiliki pada daerah tersebut (Warsito, 2001:128). Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 yang bersumber dari hasil pajak dan retribusi daerah diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dalam penetapan tarif. Pada Tabel 1.1 di bawah dapat dilihat perkembangan Penerimaan Daerah dalam kurun waktu tiga tahun.

Berdasarkan pada Tabel 1.1 Kabupaten Temanggung termasuk dalam penerimaan daerah relatif rendah dibanding Kabupaten lain dalam periode tahun 2011 hingga tahun 2013. Penerimaan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan namun dilihat dari presentase pertumbuhan pada Tabel tersebut Kabupaten Temanggung mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 9 persen.



Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Se Jawa Tengah Tahun 2011-2013 (Ribuan Rupiah)

Kabupaten	Tahun			Pertumbuhan (%)	
	2011	2012	2013	2012	2013
Kab. Batang	794.415.329	933.943.657	1,082,759,284	18	16
Kab. Temanggung	823.464.884	964.938.558	1,053,845,572	17	9
Kab. Kudus	829.832.626	1.102.466.117	1,385,106,891	33	26
Kab. Rembang	873.464.931	1.017.074.668	1,165,433,076	16	15
Kab. Pekalongan	924.083.696	1.114.533.219	1,238,140,272	21	11
Kab. Purbalingga	954.170.516	1.087.711.409	1,186,532,498	14	9
Kab. Wonosobo	979.682.252	1.031.047.909	1,144,182,523	5	11
Kab. Blora	1.007.775.883	1.127.245.001	1,292,793,100	12	15
Kab. Purworejo	1.013.075.367	1.167.943.577	1,287,470,809	15	10
Kab. Sukoharjo	1.015.438.257	1.217.485.978	1,365,641,177	20	12
Kab. Karanganyar	1.043.597.972	1.228.675.436	1,369,060,231	18	11
Kab. Banjarnegara	1.078.602.848	1.193.188.804	1,279,702,470	11	7
Kab. Sragen	1.094.585.823	1.308.940.382	1,468,966,590	20	12
Kab. Semarang	1.096.048.841	1.258.270.105	1,373,387,988	15	9
Kab. Boyolali	1.100.757.125	1.271.240.332	1,463,130,392	15	15
Kab. Magelang	1.115.043.501	1.311.901.799	1,428,243,260	18	9
Kab. Demak	1.132.135.925	1.209.429.293	1,398,722,359	7	16
Kab. Kendal	1.136.759.150	1.236.364.510	1,385,476,846	9	12
Kab. Grobogan	1.163.858.404	1.323.837.611	1,549,721,355	14	17
Kab. Wonogiri	1.166.580.279	1.339.809.192	1,394,479,260	15	4
Kab. Jepara	1.170.172.671	1.304.004.471	1,386,691,761	11	6
Kab. Pemasang	1.188.521.216	1.344.382.614	1,486,773,783	13	11
Kab. Tegal	1.204.377.844	1.354.747.859	1,313,098,040	12	-3
Kab. Pati	1.229.009.231	1.477.993.190	1,706,030,888	20	15
Kab. Kebumen	1.273.102.297	1.446.655.242	1,626,530,654	18	16
Kab. Brebes	1.315.176.063	1.567.078.034	1,783,092,344	17	9
Kab. Klaten	1.364.127.610	1.511.542.192	1,735,602,421	33	26
Kab. Banyumas	1.593.406.456	1.815.446.830	2,037,636,075	16	15
Kab. Cilacap	1.640.048.746	1.815.453.436	2,121,355,399	21	11
<b>Total</b>	<b>32.321.315.743</b>	<b>37.083.351.425</b>	<b>41.509.607.318</b>	<b>368</b>	<b>276</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1.114.528.129</b>	<b>1.278.736.256</b>	<b>1.431.365.770</b>	<b>15</b>	<b>11</b>

Sumber: Pemerintah Kabupaten (diolah)

Pemerintah dalam meningkatkan kinerja untuk memenuhi target penerimaan pajak yang sudah ditentukan maka di aturlah peraturan perundang-undangan yang terkait otonomi daerah sesuai dalam penerimaan pajak daerah yang diberlakukan.

Peraturan pemerintah semakin diperbaharui yang kemudian memunculkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk mengetahui penerimaan pajak daerah apakah sudah memenuhi target dapat dilihat pada tabel 1.2 yakni tabel yang memperlihatkan target, realisasi dan rasio pajak daerah di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Temanggung

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Rasio (Realisasi/Target) (%)</b>
<b>2007</b>	4.492.156.500	4.492.156.500	100
<b>2008</b>	5.407.135.000	5.819.499.860	108
<b>2009</b>	6.244.715.367	6.194.993.566	99
<b>2010</b>	6.339.053.000	7.389.439.664	117
<b>2011</b>	9.823.998.400	11.212.597.968	114
<b>2012</b>	12.235.861.000	11.470.230.704	94
<b>2013</b>	23.826.100.000	24.544.270.000	103
<b>2014</b>	26.179.500.000	29.622.602.704	113
<b>2015</b>	29.138.963.800	31.523.819.462	108
<b>2016</b>	30.990.000.000	27.640.000.000	89
<b>Rata-rata</b>	15.467.748.307	15.990.961.043	104

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Temanggung (Data Diolah)

Pada Tabel 1.2 antara target dan realisasi pajak daerah tiap tahunnya mengalami perubahan. Pada tahun 2012 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan, penerimaan yang diperoleh tidak sesuai dengan target pajak daerah yang sudah ditentukan. Tahun 2013 hingga tahun 2015 penerimaan pajak daerah memenuhi target yang sudah ditentukan, tetapi di lihat dari rasio tahun 2013 hingga tahun 2015 cenderung mengalami fluktuatif. Hal ini menurut Ariant(n.d) disebabkan dari adanya faktor jumlah penduduk, dan PDRB yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menjadi tanggung jawab setiap daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
  1. Hasil pajak daerah
  2. Hasil retribusi daerah
  3. Hasil perusahaan daerah
  4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari:
  1. Sumbangan dari pemerintah

2. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Semakin berkembangnya zaman peraturan mengenai pemungutan pajak dan retribusi daerah mulai mengalami reformasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai upaya mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah secara penerapan dan pemungutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengalami pemberharuan yang menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan sesuai jenis objek, subjek, dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang kemungkinan berbeda dengan jenis pajak dan retribusi daerah lainnya. Adapun risiko yang terjadi jika satu jenis pajak atau retribusi dipungut di suatu daerah namun tidak dipungut di daerah lainnya, walaupun dipungut pada berbagai daerah tetapi aturan yang diberlakukan berbeda tergantung daerah tersebut.

Tabel 1.3 Tax Ratio Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah (Jutaan Rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>PDRB (Jutaan Rupiah)</b>	<b>Tax Ratio (%)</b>
<b>2007</b>	4.492	-	3.030.590	0.15
<b>2008</b>	5.819	30	3.150.438	0.18
<b>2009</b>	6.195	6	3.248.900	0.19
<b>2010</b>	7.389	19	3.357.871	0.22
<b>2011</b>	11.213	52	3.481.838	0.32
<b>2012</b>	11.470	2	3.624.492	0.32
<b>2013</b>	24.544	114	11.299.343	0.22
<b>2014</b>	29.623	21	11.870.605	0.25
<b>2015</b>	31.524	6	12.484.288	0.25
<b>2016</b>	27.640	-12	13.110.796	0.21

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Temanggung (Data Diolah)

Pertumbuhan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu sepuluh tahun mengalami pasang surut. Tahun 2012 pertumbuhan pajak daerah sangat rendah di banding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2%. Pada tahun 2013 pertumbuhan pajak daerah yang langsung meningkat sebesar 114%, peningkatan yang terjadi memiliki perbedaan sebesar 112% di banding tahun 2012. Tahun 2014 terjadi penurunan kembali walaupun nilai pajak daerah yang diterima meningkat tetapi presentase pertumbuhan pajak daerah mengalami penurunan. Di lihat dari penerimaan pajak daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015 yang mengalami peningkatan akan tetapi pada pertumbuhan pajak daerah tahun 2014 terjadi penurunan secara terus menerus hingga tahun 2016. Presentase pertumbuhan pajak daerah tahun 2016 hanya sebesar -12%.

Pada tax ratio tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan namun di tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penerunan, selisih presentase pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 6% dan pada tax ratio mengalami penurunan menjadi sebesar 4%. Pertumbuhan yang terjadi dari tahun 2007 hingga tahun 2016 dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan kurang maksimalnya penerimaan pajak daerah yang dihasilkan.

Mengukur tax ratio Kabupaten Temanggung memasukkan unsur penerimaan pajak daerah yakni pajak-pajak yang dihimpun oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Tax ratio seringkali menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran atas kondisi pada pajak. Tax ratio dari penerimaan pajak terhadap PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2007 sampai

dengan 2016 berkisar antara 0,15% sampai dengan 0,25% sebagaimana yang terdapat pada Tabel 1.3 diatas.

Tabel 1.4 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung  
(Jutaan Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Bagian Laba Usaha Daerah</b>	<b>PAD lain-lain yang sah</b>
<b>2011</b>	11.212.60	37.984.48	6.682.54	7.463.88
<b>2012</b>	11.470.23	14.038.79	9.555.59	43.450.07
<b>2013</b>	25.583.57	15.480.55	11.287.25	49.728.82
<b>2014</b>	29.622.60	20.299.50	11.246.69	99.558.16
<b>2015</b>	31.523.82	13.410.49	13.060.83	154.503.00
<b>2016</b>	27.640.00	52.147.55	13.060.83	110.608.17

Sumber : Data APBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel 1.4 penerimaan PAD lain-lain yang sah lebih besar dibandingkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha daerah. Penerimaan pajak daerah lebih rendah dibanding penerimaan PAD lain-lain yang sah, dikarenakan kurang optimalnya penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak maka masyarakat berkewajiban dalam membayar pungutan pajak karena dapat membantu proses pembangunan perekonomian daerah. Salah satu syarat pemungutan pajak di Indonesia yaitu “*Syarat Yuridis*” yang diatur dalam Undang-undang 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

Kabupaten Temanggung yang memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang meningkat akan mempengaruhi sumber daya yang ada dalam wilayah tersebut. Beberapa argumentasi mengenai pertumbuhan penduduk yang cepat bukan masalah pembangunan yang serius (Todaro, 1984). Beberapa argumentasi meliputi sebagai berikut:

- a. Masalah pokok sebenarnya adalah keterbelakangan. Pertumbuhan penduduk hanya akan perlahan-lahan menurun setelah ekonomi maju.
- b. Alokasi sumber-sumber alam yang tidak merata daripada pertumbuhan penduduk. Kurang dari 30 persen penduduk yang tinggal, namun mereka mengkonsumsi lebih dari 80 persen sumber alam. Pengendalian sumber alam lebih penting dibanding pengendalian penduduk.
- c. Masalah pertumbuhan penduduk adalah isu atau berita bohong yang yang digunakan oleh negara-negara maju untuk kepentingan mereka sendiri.
- d. Distribusi penduduk merupakan masalah yang lebih gawat dibanding jumlah penduduk keseluruhan.
- e. Pertumbuhan penduduk diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk di Kabupaten Temanggung

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Perorang)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
<b>2012</b>	709.979	-1
<b>2013</b>	731.911	3.1
<b>2014</b>	738.915	1
<b>2015</b>	745.778	0.9
<b>2016</b>	768.339	3
<b>Total</b>	3694.922	7

*Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Pada Tabel 1.5 jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan secara terus. Tahun 2012 jumlah penduduk sebesar 709.979 jiwa dan terus meningkat hingga tahun 2016 sebesar 768.339 jiwa namun dilihat pada pertumbuhan jumlah penduduk relatif fluktuatif.

Selain PDRB dan jumlah penduduk yang dapat dijadikan gambaran pembangunan di suatu daerah, terdapat indikator lain yaitu tingkat inflasi. Jika tingkat inflasi cenderung stabil maka pembangunan cenderung tidak memiliki hambatan namun jika tingkat inflasi cenderung fluktuasi maka pembangunan di daerah tersebut memiliki hambatan.

Tabel 1.6 Tingkat Inflasi di Kabupaten Temanggung

<b>Tahun</b>	<b>Inflasi (%)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
<b>2012</b>	4,73	95
<b>2013</b>	7,01	48
<b>2014</b>	7,81	11
<b>2015</b>	2,74	-65
<b>2016</b>	2,42	-12
<b>Rata-rata</b>	2,58	16

*Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Tingkat inflasi pada tabel 1.6 cenderung mengalami fluktuatif ditahun 2013 tingkat inflasi meningkat sebesar 7,01 persen sedangkan di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,74 persen. Rata-rata tingkat inflasi di Kabupaten Temanggung sebesar 2,58 persen. Perkembangan tingkat inflasi dari tahun 2012 hingga tahun 2016 cenderung menurun. Selain tingkat inflasi, gambaran pembangunan daerah dapat dilihat juga dari jumlah pengunjung obyek wisata yang terdapat pada daerah tersebut berdasarkan obyek wisata yang ada. Obyek wisata yang berbeda dari daerah lain akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung pada obyek wisata tersebut. Wisatawan yang datang berdampak pada meningkatnya permintaan barang dan jasa di daerah. Hal ini dapat mempengaruhi pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung.



Tabel 1.7 Tingkat Jumlah Pengunjung di Kabupaten Temanggung

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengunjung (Perorang)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
<b>2012</b>	360.138	5
<b>2013</b>	305.484	-15
<b>2014</b>	338.936	11
<b>2015</b>	349.502	3
<b>2016</b>	399.455	14
<b>Rata-rata</b>	350.703	4

Tabel 1.7 pertumbuhan jumlah pengunjung di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuatif. Pertumbuhan jumlah pengunjung tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu sebesar -15 persen namun kemudian meningkat di tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan jumlah pengunjung di Kabupaten Temanggung sebesar 4 persen. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 oleh Pemerintah Daerah pemungutan pajak terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendefinisikan jenis pajak daerah yang dipungut yaitu antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak lainnya. Peraturan Pemerintah dengan pemilihan jenis pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, kabupaten atau kota merupakan kewenangan daerah otonom Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, kewenangan Pajak Daerah menjadi tanggungjawab daerah provinsi, kabupaten atau kota, dan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Pajak Daerah.

Penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan tax ratio pajak daerah. Angka tax ratio pajak digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan dalam rangka menghimpun penerimaan pajak di suatu daerah. Tinggi dan rendahnya tax ratio pajak dapat mempengaruhi tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintah yang baik (*good governance*).

Dari perhitungan dapat dilihat hasil pajak terutang yang diperoleh dan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut. Dari beberapa penjelasan diatas, penelitian ini mencoba meneliti pengaruh pajak daerah terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Temanggung. berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul ***“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah (Studi di Kabupaten Temanggung)”***.

## ***1.2 Research Gap***

### **Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah**

Arianto (2014) tentang pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah serta penelitian Artha (2016) tentang pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah memiliki hasil bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif terhadap Pajak Daerah. Hasil berbeda yang ditunjukkan oleh penelitian Ulan (2014) tentang pengaruh PDRB menunjukkan hasil bahwa PDRB memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pajak Daerah.

### **Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Pajak Daerah**

Penelitian Nastiti (n.d), Arianto (2014), dan Artha (2016) tentang pengaruh Jumlah Penduduk menunjukkan hasil bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah. Berbeda pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulan (2014) dan Putri (2013) tentang pengaruh Jumlah Penduduk yang berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah.

### **Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Daerah**

Penelitian Putri (2013) dan Nastiti (n.d) tentang Inflasi menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pajak daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) dan Artha (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yakni inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pajak daerah.

### **Pengaruh Jumlah Pengunjung Obyek Wisata terhadap Pajak Daerah**

Penelitian Tahwin (2013) tentang pengaruh Jumlah Pengunjung Obyek Wisata menunjukkan hasil bahwa Jumlah Pengunjung Obyek Wisata berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah. Berbeda dengan penelitian Purwanti (2014) tentang pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan yang menunjukkan hasil bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.8 *Research Gap*

No	Permasalahan	Research Gap	Peneliti
1.	Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah	PDRB berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah.	Arianto (2014) Nastiti (n.d) Artha, dkk (2016)
		PDRB berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah	Ulan (2014)
2.	Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Pajak Daerah	Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah	Arianto (2014) Nastiti (2014) Artha, dkk (2016) Teera dan John (2004)
		Kepadatan Penduduk berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah	Putri (2013) Ulan (2014)
3.	Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Daerah	Inflasi berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah	Putri (2013) Nastiti (n.d)
		Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah	Arianto (2014) Teera dan John (2016)
4.	Pengaruh Jumlah Pengunjung Obyek Wisata terhadap Pajak Daerah	Jumlah Pengunjung Obyek Wisata berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah	Tahwin (2013)
		Jumlah Pengunjung Obyek Wisata berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah	Purwanti (2014)

Sumber: Berbagai Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan

### 1.3 Rumusan Masalah

Pada tahun 2000 Indonesia sudah menggunakan system desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dimana setiap daerah dituntut untuk menggali potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pajak Daerah yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat mendorong pembangunan Konomi daerah. Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung dibanding Kabupaten lainnya di Jawa Tengah termasuk rendah namun dari target Pajak Daerah yang ditetapkan pemerintah daerah terealisasi dengan baik.

Pada Tabel 1.3 pertumbuhan pajak daerah dan tax ratio yang cenderung mengalami fluktuatif. Berdasarkan penelitian terdahulu variable pajak daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu PDRB, inflasi, kepadatan penduduk, dan jumlah pengunjung obyek wisata ( Arianto, 2014; Nastiti, n.d; Artha,dkk, 2016; Teera and John, 2004; Putri, 2013; Tahwin, 2013). Berdasarkan latarbelakangpada penelitian ini maka terdapat perumusan masalah yang diajukan pada penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh tingkat PDRB di Kabupaten Temanggung terhadap penerimaan pajak daerah?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung terhadap penerimaan pajak daerah?
3. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi di Kabupaten Temanggung terhadap penerimaan pajak daerah?

4. Bagaimana pengaruh tingkat jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Temanggung terhadap pajak daerah?

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh tingkat PDRB di Kabupaten Temanggung terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Menganalisis pengaruh tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung terhadap penerimaan pajak daerah.
3. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi di Kabupaten Temanggung terhadap penerimaan pajak daerah.
4. Menganalisis pengaruh tingkat jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Temanggung terhadap penerimaan pajak daerah.

### 1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya lebih menjalankan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Temanggung.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah ini, terutama untuk dapat mengetahui perkembangan peranan pajak daerah di Kabupaten Temanggung dalam

melaksanakan Otonomi Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini berdasarkan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menganalisis baik latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari landasan teori yang merupakan penjelasan mengenai dasar teoritis penelitian dengan melihat penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran menjelaskan variabel yang terkait untuk diamati dan penelitian di hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisikan definisi oprasional variabel penelitian yang diamati, jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian, yang kemudian dianalisis.

#### **BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan dari objek penelitian yang akan dibahas berupa perhitungan menggunakan alat analisis yang sesuai.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi dari laporan tentang hasil penelitian dan saran-saran penulis baik yang berlaku dengan kebijakan maupun saran penelitian yang akan datang.